

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN BUPATI SINTANG TENTANG PENGHENTIAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN PENGGANTIAN DENGAN WADAH RAMAH LINGKUNGAN

Mikael Mahin

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,
Sintang, Indonesia, Email: mahinmikael@gmail.com

Abstract: *This study discusses the implementation of the Sintang Regent's Circular Letter policy on the termination of single-use plastic usage and its replacement with environmentally friendly containers. This policy was issued as an effort by the local government to reduce the negative impacts of plastic waste on the environment and public health. The research employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of the policy to discontinue the use of single-use plastics in Sintang Regency has been carried out, but has not yet been optimal. This is due to a lack of socialization, low public awareness, and limitations in supervision and sanctions. On the other hand, supporting factors include the commitment of the local government and the increasing environmental awareness among some members of the community. It is recommended that the local government enhance continuous socialization efforts, strengthen supervision, and provide incentives to business actors who use environmentally friendly containers in order to support the successful implementation of the policy.*

Keywords: *Policy implementation, single-use plastics, environment.*

Abstrak: Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan Surat Edaran Bupati Sintang tentang Penghentian Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Penggantian dengan Wadah Ramah Lingkungan. Kebijakan ini diterbitkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penghentian penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Sintang telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan pengawasan dan sanksi. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa komitmen pemerintah daerah dan meningkatnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap lingkungan. Di sarankan agar pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi secara berkelanjutan, memperkuat pengawasan, serta memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menggunakan wadah ramah lingkungan guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, plastik sekali pakai, lingkungan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kebutuhan plastik terus meningkat hingga mengalami kenaikan rata-rata 200 ton per tahun (Arico & Jayanthi, 2018). Hal ini kemudian menimbulkan limbah sampah plastik (Qodriyatun et al., 2019), karena sangat potensial mencemari lingkungan karena berbahaya bagi kesehatan (Anom & Lombok, 2020). Plastik telah berkembang seiring dengan masyarakat. Banyak kemajuan di beberapa sektor disebabkan oleh plastik (Sousa, 2021). Namun adanya sampah plastik masih menjadi masalah publik yang sukar dipecahkan. Apalagi penggunaan bahan plastik semakin lama semakin meluas dan meningkat karena sifatnya kuat dan tidak mudah rusak oleh pelapukan.

Menurut Anom & Lombok (2020) limbah sampah plastik sangat potensial mencemari lingkungan karena akan memberikan banyak masalah seperti mengotori lingkungan sekitar, dan jika terjadi kebakaran plastik menimbulkan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Abdurahman et al. (2021) mengemukakan implikasi penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik pada mini market di masyarakat pinggiran sungai tidak efektif selama 3 tahun. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor perilaku ekonomi dan kebiasaan masyarakat setempat.

Kabupaten Sintang merupakan Kabupaten memiliki masalah dengan plastik sehingga Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan berbagai upaya kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah

Kabupaten Sintang untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membuat Surat Edaran Bupati Sintang Nomor: 600.4.15.1/3053/DLH-C/2025 tentang penghentian penggunaan plastik sekali pakai dan penggantian dengan wadah ramah lingkungan sebagai bentuk mengurangi timbulan sampah plastik dari sumbernya serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha agar beralih ke wadah yang dapat digunakan ulang atau lebih ramah lingkungan.

Surat edaran ini dipilih sebagai instrumen kebijakan karena sifatnya yang cepat, fleksibel, dan mudah diterapkan dalam jangka pendek. Surat Edaran Bupati Sintang tentang penghentian penggunaan plastik sekali pakai dan penggantian dengan wadah ramah lingkungan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pengamatan awal, timbulan sampah plastik masih tergolong tinggi, terutama dari sektor perdagangan, pasar tradisional, dan usaha makanan-minuman. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan belum tentu diikuti oleh tingkat kepatuhan dan perubahan perilaku yang optimal di masyarakat. Kurangnya sosialisasi, keterbatasan alternatif wadah ramah lingkungan, serta rendahnya pengawasan menjadi permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan berbasis surat edaran.

Terkait dengan Surat Edaran Bupati Sintang, masih terdapat indikasi permasalahan pada Standar dan tujuan kebijakan belum sepenuhnya dipahami secara merata oleh pelaku usaha dan masyarakat. Dari sisi sumber daya, keterbatasan sarana pendukung dan alternatif wadah ramah lingkungan dapat memengaruhi kepatuhan terhadap kebijakan. Selain itu, komunikasi kebijakan yang belum optimal serta sikap pelaksana dan masyarakat yang masih terbiasa menggunakan plastik sekali pakai menjadi tantangan tersendiri dalam proses implementasi.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Sintang juga turut memengaruhi efektivitas kebijakan. Sebagian pelaku usaha kecil masih mengandalkan plastik sekali pakai karena alasan kepraktisan dan biaya yang relatif murah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga pendekatan sosial dan ekonomi yang mendukung keberlanjutan implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Suparno (2017) mendefinisikan implementasi adalah sebagai berikut: "Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undangan, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Menurut Ripley dan Franklin dalam Elena (2021), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah

penetapan undang-undang yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, ataupun sejenis keluaran yang nyata. Van Meter dan Van Horn dalam Pramono Joko (2020) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Adapun model pendekatan implementasi kebijakan dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up* (Firdaus Idos, 2019). Adapun model yang dikembangkan oleh Van Meter Dan Van Horn (1975), Ada 6 faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: a) Standar Dan Sasaran Kebijakan, b) Sumber Daya, c) Karakteristik Organisasi Pelaksana, d) Sikap (*Disposition*) Para Pelaksana, e) Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana, f) Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Informan ditentukan secara purposif yang terdiri dari Kepala Dinas, dan masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif model interaktif (Miles Hubberman dan Saldana 2014). Data kualitatif dianalisa berdasarkan kerangka konseptual dengan menggunakan tahap-tahap analisa data kualitatif secara interaktif, dan hasilnya disajikan dalam bentuk

deskripsi. Dalam menganalisa data kualitatif yang bersumber dari wawancara mendalam, peneliti akan memperhatikan kata-kata, konteks dan konsistensi dari respon-respon yang diberikan oleh para informan. Peneliti melakukan *member check* melalui diskusi dengan para narasumber untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah sesuai menurut para informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model analisis yang digunakan peneliti untuk menganalisis Surat Edaran Bupati Sintang Nomor: 600.4.15.1/3053/DLH-C/2025 tentang penghentian penggunaan plastik sekali pakai dan penggantian dengan wadah ramah lingkungan adalah Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yang fokus pada ketercapaian 6 variabel sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil telaah dokumen Surat Edaran Bupati Sintang tentang penghentian penggunaan plastik sekali pakai, dapat diketahui bahwa standar kebijakan telah ditetapkan dalam bentuk imbauan dan arahan kepada pelaku usaha, serta masyarakat untuk mengurangi dan menghentikan penggunaan plastik sekali pakai serta beralih ke wadah ramah lingkungan. Sasaran kebijakan mencakup para Pelaku Usaha, Pimpinan Pusat Pembelanjaan, Toko Modern, Pasar Tradisional, Restoran, Hotel Se-Kabupaten Sintang, Dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Sintang.

Namun, dalam implementasi kebijakan Surat Edaran Bupati Sintang

tentang penghentian penggunaan plastik sekali pakai menunjukkan bahwa standar kebijakan belum disertai dengan indikator kinerja yang terukur, seperti target persentase pengurangan plastik atau batas waktu implementasi yang jelas. Hal ini menyebabkan pemahaman pelaksana terhadap sasaran kebijakan masih bersifat normatif. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa kejelasan standar dan sasaran kebijakan sangat menentukan tingkat keberhasilan implementasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan ini meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pelaksanaan kebijakan terutama bertumpu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dengan dukungan perangkat daerah lainnya. Jumlah aparatur yang terlibat relatif terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran kebijakan.

Dari sisi anggaran, tidak ditemukan alokasi anggaran khusus yang secara spesifik ditujukan untuk implementasi Surat Edaran ini, terutama untuk kegiatan sosialisasi dan pengawasan. Keterbatasan anggaran berdampak pada minimnya kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha kecil dalam penyediaan alternatif wadah ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur birokrasi, kewenangan, serta pola kerja antar instansi. Implementasi kebijakan ini melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, kecamatan/kelurahan, dan pemerintah desa. Secara kelembagaan, instansi-instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang relevan dengan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai.

Namun demikian, koordinasi internal dan pembagian tugas antar organisasi pelaksana belum sepenuhnya terstruktur dengan baik. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait implementasi Surat Edaran Bupati Sintang Nomor: 600.4.15.1/3053/DLH-C/2025 tentang penghentian penggunaan plastik sekali pakai dan penggantian dengan wadah ramah lingkungan menyebabkan pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada inisiatif masing-masing organisasi, sehingga hasilnya belum seragam.

4. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Komunikasi antar organisasi pelaksana merupakan faktor penting dalam memastikan kebijakan dipahami dan dijalankan secara konsisten. Dalam implementasi Surat Edaran Bupati Sintang Nomor: 600.4.15.1/3053/DLH-C/2025 tentang penghentian penggunaan plastik sekali pakai dan penggantian dengan wadah ramah lingkungan komunikasi formal telah

dilakukan melalui surat edaran, rapat koordinasi, dan sosialisasi.

Namun, intensitas dan keberlanjutan komunikasi tersebut masih terbatas. Informasi mengenai kebijakan belum sepenuhnya tersampaikan secara merata hingga ke tingkat pelaku usaha kecil dan masyarakat desa. Kurangnya komunikasi yang efektif ini menyebabkan sebagian pelaksana dan sasaran kebijakan belum memahami secara utuh tujuan serta mekanisme pelaksanaan kebijakan penghentian plastik sekali pakai.

5. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana kebijakan menunjukkan variasi yang cukup signifikan, sebagian besar pelaksana mendukung kebijakan ini karena dianggap penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun, pada tingkat pelaku usaha dan masyarakat, masih ditemukan sikap kurang mendukung, terutama karena kebijakan ini dinilai menambah biaya operasional.

Beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa wadah ramah lingkungan memiliki harga yang relatif lebih mahal dibandingkan plastik sekali pakai. Selain itu, tidak adanya sanksi yang tegas maupun insentif bagi pelaku usaha yang patuh menyebabkan tingkat kepatuhan masih rendah. Sikap pelaksana yang belum sepenuhnya positif ini berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

6. Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi implementasi

kebijakan. Dari sisi sosial, kesadaran masyarakat Kabupaten Sintang terhadap isu lingkungan mulai meningkat, namun kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai masih cukup kuat.

Secara politik, kebijakan ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah, namun belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah. Dari sisi ekonomi, kondisi pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal menjadi tantangan tersendiri dalam beralih ke wadah ramah lingkungan. Faktor-faktor ini menyebabkan implementasi kebijakan berjalan secara bertahap dan belum mencapai hasil yang optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, aspek standar dan sasaran kebijakan, kebijakan ini telah memiliki tujuan yang jelas, yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai Para Pelaku Usaha, Pimpinan Pusat Pembelanjaan, Toko Modern, Pasar Tradisional, Restoran, Hotel Se-Kabupaten Sintang, Dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Sintang. Namun, standar operasional dan indikator keberhasilan masih perlu diperjelas agar sasaran kebijakan dapat tercapai secara optimal dan terukur.

Kedua, Dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana pendukung. Keterbatasan tersebut memengaruhi intensitas pengawasan, sosialisasi, serta penyediaan alternatif wadah ramah

lingkungan yang terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah.

Ketiga, Karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan bahwa instansi terkait telah memiliki struktur dan kewenangan yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Namun, koordinasi internal dan pembagian tugas antar organisasi pelaksana masih belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga pelaksanaan kebijakan di lapangan belum merata dan konsisten.

Keempat, dari sisi sikap (disposition) para pelaksana, pada umumnya terdapat komitmen dan dukungan terhadap kebijakan ini. Akan tetapi, tingkat pemahaman dan keseriusan dalam pelaksanaan masih bervariasi, sehingga memengaruhi konsistensi penerapan kebijakan, terutama dalam pengawasan dan penegakan aturan.

Kelima, aspek komunikasi antar organisasi pelaksana menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha. Kurangnya intensitas dan kejelasan komunikasi menyebabkan masih adanya kesalahpahaman dan rendahnya kepatuhan terhadap kebijakan penghentian plastik sekali pakai.

Keenam, aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik turut memengaruhi implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, menjadi tantangan dalam beralih ke wadah ramah lingkungan yang relatif lebih mahal. Dari sisi sosial, kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya pelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Secara politik, dukungan pemerintah daerah sudah cukup kuat, namun perlu diiringi dengan kebijakan lanjutan yang lebih mengikat agar implementasi dapat berjalan berkelanjutan.

Saran. Diperlukan penguatan pada aspek regulasi, sumber daya, koordinasi antar organisasi, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar tujuan penghentian penggunaan plastik sekali pakai dan peralihan ke wadah ramah lingkungan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, H., Suryadi, B., Fitri, M. R., Alisa, F. N., Dwi, D., Astuti, I., Adina, S., Rasyid, R. M., & Renita, L. (2021). *Dampak Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Masyarakat Pinggiran Sungai Kota Banjarmasin. Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 6(1-5).
- Agosnaidi, Agus Hendrayady, E. (2015). *Implementasi Kebijakan Pemilahan Sampah Dalam PERDA Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015*. 1-11.
- Anom, I. D. K., & Lombok, J. Z. (2020). *Karakterisasi Asap Cair Hasil Pirolisis Sampah Kantong Plastik sebagai Bahan Bakar Bensin. Fullerene Journal of Chemistry*, 5(2), 96-101. <https://doi.org/10.37033/fjc.v5i2.206>
- Arico, Z., & Jayanthi, S. (2018). *Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Produk Kreatif Sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.31604/jpm.v1i1.1-6>
- Elena. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Labukkang Kota Parepare* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Firdaus, I. (2019). *Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang* (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press
- Sousa, F. D. B. de. (2021). *The role of plastic concerning the sustainable development goals: The literature point of view. Cleaner and Responsible Consumption*, 3(100020), 1-24. <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2021.100020>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.